# BAB IV

# PEMBAHASAN

## 4.1 Realisasi *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD)

Forum IUSSD sendiri melibatkan pemerintah dan pihak-pihak militer kedua negara untuk menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya. Forum komunikasi dua arah antar Departemen Pertahanan dan institusi militer Amerika Serikat dan Indonesia ini rutin diadakan setahun sekali dengan tempat dan waktu yang bergantian.

Selain dialog, bentuk realisasinya yaitu latihan bersama yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama serta mempererat hubungan kedua negara di bidang kemiliteran, dan bantuan militer yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata Indonesia, Amerika Serikat memberikan bantuan militer berupa dana ataupun peralatan militer kepada militer Indonesia agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat meningkatkan pengetahuan serta kapabilitas angkatan laut, angkatan udara dan angkatan daratnya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun gangguan keamanan dari dalam dan luar negeri. Realisasi IUSSD

ini melalui program dialog antara US PACOM dengan TNI dalam *U.S-Indonesia Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD), *Foreign Military Financing* (FMF), *Foreign Military Sales* (FMS), dan *International Military Education and Training* (IMET) yang kemudian diluaskan cakupannya menjadi *Expanded International Military Education and Training* (E-IMET), semua program tersebut diadakan Amerika Serikat. Realisasi IUSSD ini juga melibatkan Indonesia dalam ke dalam bentuk latihan bersama dengan negara-negara kawasan dan negara lainnya.

### 4.1.1 Dialog

Kerjasama pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dan Indonesia direalisasikan dengan dialog yang didahului dengan presentasi dari kedua belah pihak dan membahas tentang topik-topik yang antara lain tentang keamanan regional dan global, serta topik-topik lainnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan, yang juga berhubungan dengan TNI.

Dalam dialog itu, kedua delegasi membahas membahas berbagai masalah keamanan yang terjadi dalam dalam negeri negara masing-masing ataupun langkah-langkah yang akan diterapkan oleh kedua negara untuk menangani segala kemungkinan yang terjadi.

Indonesia merupakan negara yang membutuhkan bantuan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terbesar dan terkuat, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas militernya karena dengan luas negara yang besar dan memiliki perairan yang luas, Indonesia masih belum bisa menyeimbangkan militernya dengan keadaan wilayahnya tersebut. Realisasi dari

dialog kedua negara tersebut dilampirkan dalam tabel yang dikategorikan sesuai dengan masalah yang dibahas pertahun sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Presentasi Delegasi Amerika-Serikat dan Indonesia**
**yang direalisasikan oleh Kedua Negara**

| | |
|---|---|
| **IUSSD 1** | - |
| **IUSSD 2** | - |
| **IUSSD 3** | - |
| **IUSSD 4** | Presentasi dari kedua delegasi menghasilkan realisasi di tahun 2005, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengantisipasikan bahwa personil militer Indonesia mengambil bagian dalam 132 aktivitas bersama. Aktivitas itu berfokus pada "Seminar Kontra-Terorisme Untuk Mendukung Kerjasama Dalam Pertahanan Keamanan Dan Pertukaran Tenaga Ahli". Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan langkah-langkah memperkuat kerjasama dalam hal mengatasi aksi terorisme. |
| **IUSSD 5** | - |
| **IUSSD 6** | - |

sumber: Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008

Dalam IUSSD ke 1, 2, 3, 5, dan 6, tidak ada realisasi dari presentasi dalam dialog yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kedua delegasi melanjutkan dialog dengan membahas masalah tentang Situasi Keamanan Regional dan Global. Adapun isi dari dialog yang direalisasikan oleh kedua delegasi dengan topik tersebut dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**
**Dialog Tentang Situasi Keamanan Regional dan Global**
**yang direalisasikan oleh Kedua Negara**

| | |
|---|---|
| **IUSSD 1** | - |
| **IUSSD 2** | Realisasi dari dialog kedua delegasi adalah latihan bantuan bencana alam yang dilaksanakan antara TNI AU dan US PACOM |

| | |
|---|---|
| | beserta 19 negara lainnya dalam *Pacific Airlift Rally 2007* untuk menanggulangi bahaya bencana alam yakni gempa-bumi (*Earthquake*). Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan personil TNI dalam melakukan tindakan evakuasi ataupun menghadapi bencana alam. |
| **IUSSD 3** | Realisasi dari dialog IUSSD ke-3 ini kedua negara mengadakan latihan bersama antar militer, pendidikan militer maupun latihan bersama yang melibatkan negara-negara lain, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan negara lainnya. Realisasinya dilaksanakan dalam program *United States Pacific Command Theatre Security Cooperation Program* (Program Kerjasama Pertahanan Keamanan Komando Pasifik Amerika Serikat) tahun 2004. Kegiatan ini bertujuan agar untuk melatih kemampuan angkatan bersenjata negara-negara yang bekerjasama. |
| **IUSSD 4** | Pada IUSSD ke 4 ini, dialog direalisasikan dengan latihan operasi militer bersama antara TNI dan US PACOM di Perairan Tanjung Priok, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel TNI dalam melaksanakan perencanaan misi militer untuk pengamanan dan pertahanan instalasi penting, termasuk untuk menangani masalah terorisme. |
| **IUSSD 5** | - |
| **IUSSD 6** | - |

sumber: Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008

Dalam IUSSD ke 5 dan 6, tidak ada realisasi dari dialog tentang situasi keamanan regional dan global yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kemudian dialog tersebut dilanjutkan dengan topik tentang masalah-masalah khusus yang menjadi perhatian khusus bagi hubungan kedua negara, dialog tersebut menghasilkan realisasi dan dilampirkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**
**Dialog Tentang Masalah-Masalah Khusus**
**yang direalisasikan oleh Kedua Negara**

| | |
|---|---|
| **IUSSD 1** | - |
| **IUSSD 2** | Pada tahun 2006 TNI dan US PACOM memfokuskan kerjasama pendidikan dan latihan, kerjasama ini meliputi 174 kegiatan, baik di tingkat taktis, strategis, operasional dan logistik. Ke 174 kegiatan itu dilakukan oleh keempat kelompok kerja (*working group*) yang berada di bawah Panitia Kerja Eksekutif (*Executive Working Committee*/EWC), yang meliputi pendidikan dan latihan intelijen (tiga kegiatan), logistik dan bantuan keamanan (empat kegiatan), *training events working group* (42 kegiatan) serta *education and specific programm* sebanyak 125 kegiatan. |
| **IUSSD 3** | - |
| **IUSSD 4** | Personil angkatan bersenjata Indonesia telah ikut serta dalam program *Cooperation Afloat and Readiness Training* (CARAT/Pelatihan Kesigapan dan Kerjasama di Laut), yang adalah serangkaian pelatihan militer bilateral yang berskala regional.<br>Di dalam pelatihan CARAT pada tahun 2005, personil militer Indonesia mempelajari keahlian yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk memerangi ancaman terorisme di laut dan kejahatan trans-nasional di laut. |
| **IUSSD 5** | - |
| **IUSSD 6** | - |

sumber: Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008

Dalam IUSSD ke 1, 3, 5 dan 6, tidak ada realisasi dari dialog tentang masalah-masalah khusus yang dilaksanakan oleh kedua negara. Kemudian kedua delegasi membahas topik-topik lain yang berkaitan dengan hubungan militer dan isu-isu yang terjadi di dunia, serta kepentingan-kepentingan kedua negara dalam

konteks kerjasama militer untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, seperti terorisme, bencana alam, maupun program-program kerjasama lain yang telah terjalin. Realisasi dari dialog tersebut dilampirkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Dialog Tentang Topik-Topik Lain**
**yang direalisasikan oleh Kedua Negara**

| | |
|---|---|
| **IUSSD 1** | - |
| **IUSSD 2** | - |
| **IUSSD 3** | - |
| **IUSSD 4** | Untuk topik tentang dana IMET, FMF, maupun FMS, Amerika Serikat menyatakan telah tersedianya dana untuk membantu Indonesia membeli peralatan atau pelatihan sekitar $US 1 M untuk TNI melalui program FMF. |
| **IUSSD 5** | - |
| **IUSSD 6** | AS bersedia untuk membantu pendirian *Indonesian Defense University* (IDU) hingga bantuan finansial. |

sumber: Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008

Dalam IUSSD ke 1, 3, 5 dan 6, tidak ada realisasi dari dialog tentang topik-topik terorisme ataupun bencana alam yang dilaksanakan oleh kedua negara. Realisasi yang dilaksanakan hanya tersedianya dana IMET untuk Indonesia.

Dalam dialog yang telah dilaksanakan, seperti yang telah disebutkan dalam tabel diatas salah satu realisasi dari IUSSD adalah dibentuknya *U.S-Indonesia Defence Dialogue* (USIBDD), yaitu program dialog antara TNI dan US PACOM. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan TNI dalam hal kemampuan personil secara individu maupun kelompok, TNI dan US PACOM saling bertukar

informasi dan pengetahuan untuk dapat menghadapi segala macam kemungkinan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban TNI di bidang kemanusiaan.

Dalam dialog dengan US PACOM ini, militer Indonesia juga mendapatkan pendidikan dan latihan intelijen yang berguna untuk mempertajam kemampuannya dalam mengumpulkan data yang akan menjadi tumpuan segala bentuk pelaksanaan operasi militer dalam berbagai skala guna kepentingan pertahanan nasional. Dialog antara TNI dan US PACOM ini terus dilaksanakan hingga sekarang, dan kegiatannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama kemampuan teknis TNI.

### 4.1.2 Latihan Bersama

Indonesia dalam membangun kerjasama di bidang pertahanan dengan negara lain dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan prinsip pertahanan yang dianut, yakni defensif aktif. Namun, di dalam pelaksanaannya kerjasama di bidang pertahanan harus melalui perjanjian kerjasama untuk memayungi setiap bentuk kegiatan operasional, seperti pembicaraan antar militer, latihan bersama antar angkatan bersenjata, atau antar angkatan kedua negara.

Sebagai realisasi dari dialog keamanan Amerika Serikat-Indonesia, latihan bersama yang ditekankan oleh pemerintah RI tidak hanya terpusat kepada satu angkatan bersenjata, tetapi kepada seluruh angkatan bersenjata (Tri-Matra; Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat).

Realisasinya dilaksanakan dalam program *United States Pacific Command Theatre Security Cooperation Program* (Program Kerjasama Pertahanan

Keamanan Komando Pasifik Amerika Serikat) yang menyelenggarakan 85 kegiatan di tahun 2004, dan di tahun 2005 Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengantisipasikan bahwa personil militer Indonesia mengambil bagian dalam 132 aktivitas bersama. Aktivitas itu berfokus pada "Seminar Kontra-Terorisme Untuk Mendukung Kerjasama Dalam Pertahanan Keamanan Dan Pertukaran Tenaga Ahli". TNI mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi dan mengatasi masalah terorisme dengan melakukan kerjasama pertahanan dan keamanan serta melakukan pertukaran tenaga ahli untuk saling bertukar pandangan dengan militer Amerika Serikat. Realisasi dialog kerjasama yang telah dilaksanakan dalam latihan bersama dilampirkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**
**Latihan Bersama yang telah dilaksanakan**

| Latihan Bersama | Waktu dan Lokasi | Peserta |
|---|---|---|
| Latihan Operasi Militer | Tanggal 29 Agustus-12 September 2005 di Perairan Tanjung Priok | TNI dan US PACOM. |
| CARAT atau Pelatihan Kesigapan dan Kerjasama di Laut | Tahun 2005 dan 2006 di Indonesia | TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat. |
| *Cobra Gold* | Tahun 2006 di Thailand | TNI dan Angkatan Bersenjata Thailand. |
| Latihan Pemeliharaan Perdamaian *Khaan Quest* | Tahun 2006 dan 2007 di Mongolia | TNI dan Angkatan Bersenjata Mongolia. |
| *Naval Engagement Activity* (NEA) | Akhir bulan Maret 2007 di Indonesia | TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat. |

| | | |
|---|---|---|
| *Pacific Airlift Rally 2007* | Tanggal 20-24 Agustus 2007 di Indonesia | TNI, US PACOM, Dan 19 Negara lainnya |

sumber: data diolah sendiri berdasarkan data dari www.tni.mil.id, diakses 26 Juni 2009, www.etan.org, diakses 29 Juni 2009

Kegiatan TNI dan US PACOM (*US Pacific Command*) di 2005, menggelar latihan operasi militer bersama di Perairan Tanjung Priok. Latihan berlangsung selama 16 hari, mulai 29 Agustus sampai 12 September 2005. Latihan ini merupakan yang keenam kali yang digelar antara TNI dan US PACOM, latihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel TNI dalam melaksanakan perencanaan misi militer untuk pengamanan dan pertahanan instalasi penting, termasuk untuk menangani masalah terorisme. Latihan ini diikuti sekitar 90 prajurit TNI dan 14 orang dari prajurit Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik. Dari TNI terlibat pasukan dari tiga matra, yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat dari TNI AD, Detasemen Bravo dan Komando Pasukan Khas dari TNI AU serta Detasemen Jalamangkara (Denjaka) dari AL. Pelatihan ini akan memberikan berbagai materi meliputi prinsip analisis target, memproses target, pertukaran informasi, pertukaran teknis dan taktik mengamankan tempat-tempat penting dari gangguan, termasuk gangguan teroris. Untuk melancarkan latihan, TNI mengerahkan pesawat *Cassa 212 TNI AL*, satu *hellybell* TNI AD serta satu unit *Sea Raider* TNI AL. Dalam kegiatan ini mereka juga melakukan pelatihan evakuasi medis untuk memberikan perawatan terhadap personel yang mengalami kecelakaan saat latihan.

Selain program tadi, personil angkatan bersenjata Indonesia juga telah ikut serta dalam program *Cooperation Afloat and Readiness Training* (CARAT atau Pelatihan Kesigapan dan Kerjasama di Laut), yang adalah serangkaian pelatihan militer bilateral yang berskala regional. CARAT yang merupakan rangkaian pelatihan militer bilateral tahunan antara AS dan enam negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia itu bertujuan meningkatkan kerjasama regional, menciptakan pemahaman bersama di antara angkatan militer yang ikut pelatihan dan mengembangkan kesiapan operasional. CARAT di tahun 1998 dibatalkan setelah Kongres mempermasalahkan *Joint Combined Exchange Training* (JCET). Letnan Kolonel Willem membantu koordinasi angkatan laut Indonesia dalam CARAT pada bulan Agustus 1999 dan kemudian mengunjungi Dili sebagai pejabat senior di kantor pusat militer KOREM darimana milisi pengacau Dili dioperasikan. Di dalam pelatihan CARAT pada tahun 2005, personil militer Indonesia mempelajari keahlian yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk memerangi ancaman terorisme di laut dan kejahatan trans-nasional di laut. Di tahun 2006 sekitar 2000 personil dari Amerika Serikat dan Indonesia berpartisipasi dalam pelatihan CARAT dalam beberapa skenario termasuk pencarian, penggeledahan, penyitaan, demonstrasi, operasi amfibi, penyelaman dan penyelematan kapal, serta taktik perlindungan bagi armada kapal kecil. Angkatan Laut Indonesia telah mendapatkan banyak hal yang dapat dilakukan dalam menangani terorisme di laut.

Indonesia juga menjadi pengamat dalam program *Cobra Gold* sejak tahun 2000 dan ambil bagian untuk pertama kali di tahun 2006. Semula *Cobra Gold*

merupakan salah satu latihan militer bersama Armada Ketujuh AS dengan Thailand. Namun, kini latihan bersama itu berkembang menjadi latihan militer bersama antara Armada Ketujuh AS dengan Thailand yang dapat melibatkan negara lain di Asia Tenggara, serta satu perwakilan negara yang tergabung dalam *Multinational Planner of Augmentation Team* (MPAT), *Cobra Gold* dilakukan sekali setahun, dan terutama dilakukan dengan Thailand. Di tahun 2006 dan 2007 Indonesia juga berpartisipasi dalam latihan pemeliharaan perdamaian *Khaan Quest* dengan Mongolia sebagai tuan rumah.

Di akhir bulan Maret 2007, satuan marinir dari Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan untuk melakukan latihan militer bersama. Lebih dari 700 marinir dua negara tersebut mengambil bagian dalam *Naval Engagement Activity* (NEA) (Aktivitas Keikutsertaan Angkatan Laut) yang pertama. Ini adalah latihan di dalam wilayah pelabuhan yang meliputi serangan amfibi, operasi susur sungai, hukum yang berlaku dalam konflik senjata, hukum yang berlaku dalam pertempuran, pertolongan dalam bencana, bantuan kemanusiaan, dan pembajakan. Sasaran latihannya meliputi terpeliharanya dan meningkatnya hubungan antar kedua negara khususnya Angkatan Laut kedua belah pihak, meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme personil di bidang hukum dan penanggulangan bencana alam, meningkatnya pengetahuan tentang pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) atau *Military Operation Other Than War* (MOOTW), meningkatkan kemampuan prajurit mariner dalam melaksanakan Operasi Raid Amphibi (*Amphibious Raid*), Operasi Perang Kota (*Urban Warfare*) dan Operasi Sungai (*Riverine Operation*),

serta meningkatnya pengetahuan tentang Penyelamatan Kapal dari bahaya Nubika.

Selain itu, latihan bantuan bencana alam yang dilaksanakan antara TNI AU dan US PACOM beserta 19 negara lainnya dalam *Pacific Airlift Rally 2007* untuk menanggulangi bahaya bencana alam yakni gempa-bumi (*Earthquake*), dalam latihan FTX (*Field Training Exercise*) selain latihan CPX (*Command Post Exercise*) dilaksanakan penerjunan barang dengan teknik tertentu (*CDS/Container Delivery System*), HE (*Heavy Equipment*) dan *Bundle Drop* serta *drooping* pasukan (*Static and Free-Fall*). Dalam keadaan medan yang sangat tidak memungkinkan untuk diadakan pendaratan pasukan akibat gempa bumi yang telah meluluhlantakkan *run-way*, Pasukan Khas TNI Angkatan Udara tetap melakukan pendaratan pada *Short Field Landing*. 19 negara yang dilibatkan dalam *latihan bencana ala mini* antara lain seperti Amerika Serikat, Indonesia, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, India, Malaysia, Mongolia, Nepal, Papua New Guinea, Madagaskar, Philipina, Singapura, Srilanka, Thailand, Kongo, Vietnam. Pesawat yang digunakan *C-17 Globemaster* dan *C-130 dari US Air Force*, *C-130* dari *Republic Madagaskar Air Force*, *AN-32* dari Bangladesh dan *C-130* dari TNI Angkatan Udara (http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl& id=113012006115459, diakses 29 Maret 2009)

### 4.1.3 Bantuan Militer

Bentuk realisasi yang lain dari kerjasama IUSSD ini adalah dengan bantuan militer yang diberikan dalam bentuk dana ataupun peralatan militer.

Indonesia menerima dana bantuan militer ini salah satunya melalui program *Expanded International Military Education and Training* (E-IMET) yang merupakan sub-program dari IMET, IMET merupakan program dari *State Department* yang diimplementasikan melalui *Department of Defense*. Semua dana IMET bagi Indonesia dihentikan setelah peristiwa *Pembantaian Santa Cruz* tahun 1991, akan tetapi diamandemen di tahun 1995 sehingga melalui program E-IMET Indonesia menerima bantuan untuk tahun 1996. E-IMET diciptakan di tahun 1991 untuk melatih para anggota militer dan kemudian juga untuk penduduk sipil dalam bidang manajemen, hubungan sipil-militer, dan pemeliharaan perdamaian. Di bulan Juni 1997, Indonesia secara singkat menolak bantuan E-IMET, keberatan dengan kritik Amerika Serikat tentang pelanggaran hak asasi manusia dan dengan pembatasan-pembatasan bentuk-bentuk bantuan militer lainnya. Keikutsertaan Indonesia secara teratur dalam program E-IMET bertahun-tahun sebelum Referendum kemerdekaan Timor Timur, tidak menghalangi militer Indonesia untuk melakukan kampanye kekerasan dan penghancuran di tahun 1999. Setelah peristiwa tahun 1999 itu, semua bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia dihentikan. Akan tetapi, sekalipun program IMET reguler bagi Indonesia tetap dihentikan, E-IMET untuk Indonesia dipulihkan di tahun 2002.

Selain E-IMET, dana militer yang diberikan Amerika Serikat juga diberikan melalui FMF, FMF menyediakan dana dan pinjaman bagi pemerintah asing untuk pembelian perlengkapan militer dan jasa terkait. FMF diatur oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (dikepalai oleh seorang atau Sekretaris Negara) akan tetapi pelaksanaan hariannya dilakukan dengan pengawasan dari

Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sama seperti dana IMET, FMF untuk Indonesia dihentikan sementara waktu di tahun 1999 setelah militer Indonesia melakukan kampanye teror atas penduduk Timor Timur, akan tetapi dibuka kembali pada tahun 2006.

Pada bulan Nopember 2005, dalam waktu 48 jam setelah larangan ditetapkan oleh Kongres, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mementahkan larangan yang dimandatkan oleh Kongres atas FMF. Walaupun di tahun 2005 Indonesia tidak menerima FMF, akan tetapi di tahun 2006 Indonesia menerima US$ 990.000. Pemerintahan Bush memintakan US$ 6.500.000 dana FMF bagi Indonesia untuk tahun 2007. Permintaan untuk tahun 2008 adalah sebesar US$ 15.700.000 (lebih dari dua kali lipat permintaan untuk tahun 2007), yang menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ditujukan bagi Indonesia untuk mewujudkan reformasi militer dan untuk meningkatkan keamanan laut, kontra-terorisme, mobilitas, dan kemampuan untuk mengatasi keadaan bahaya (http://www.etan.org/news/2007/milglossarybh.htm, diakses 29 Juni 2009).

Di bulan Mei 2005, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa Penjualan melalui FMS atas senjata klasifikasi tidak mematikan akan dibuka kembali. Pada bulan November tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tidak berlakunya semua persyaratan hak asasi manusia yang dimandatkan oleh Kongres dengan alasan keamanan nasional. Saat ini tidak ada pembatasan legislatif atas pembelian senjata oleh militer Indonesia.

## 4.2 Kendala-kendala Dalam Merealisasikan Kesepakatan *Indonesia-U.S. Security Dialogue* (IUSSD)

Dalam merealisasikan kesepakatan yang dihasilkan dalam IUSSD, Indonesia tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan. Kendala-kendala muncul dalam usaha Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Kendala tersebut datang dari Kongres Amerika Serikat yang memutuskan semua bantuan dana serta realisasi program-program kerjasama pertahanan dan keamanan di bawah payung IMET serta mengembargo militer Indonesia sebagai hasil dari tindak pelanggaran HAM secara besar-besaran di Santa Cruz, Timor Timur oleh TNI pada tahun 1991. Dan beberapa kendala lainnya seperti Anggaran Pertahanan yang tidak pernah mencukupi kebutuhan setiap angkatan militer Indonesia, baik untuk pengembangan dan pengadaan kebutuhan Alutsista.

### 4.2.1 Penghentian Dana *International Military Education and Training* (IMET)

Program IMET diciptakan pada tahun 1976 dan menjadi saluran utama dengan mana Amerika Serikat melatih aparat militer asing. IMET diawasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan diimplementasikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setelah invasi Indonesia ke Timor Timur sampai dengan tahun 1991, lebih dari 2.600 tentara Indonesia menerima IMET. Di bulan Oktober 1992, setelah peristiwa berdarah Pembantaian Santa Cruz di tahun 1991, Kongres menghentikan dana IMET untuk tahun fiskal 1993-1996. Demikian juga setelah kampanye teror pihak militer Indonesia dijalankan

sekitar Referendum tahun 1999, semua bantuan militer Amerika Serikat dihentikan sementara.

Di tahun 2000, karena *Leahy Amandment* atas *Foreign Operations Appropriations Act* (Undang-Undang Apropriasi Operasi Luar Negeri), semua bantuan militer untuk Indonesia dikondisikan dengan pemulangan puluhan ribu pengungsi Timor Timur, akuntabilitas atas kejahatan atas hak asasi manusia dan persyaratan-persyaratan lainnya. Seluruh bantuan pendidikan militer ke Indonesia di bawah IMET dibekukan. Namun, pada tahun 1995 sejumlah dana untuk pelatihan dicairkan kembali di bawah program *Extended-IMET* (E-IMET). Akan tetapi, selama tahun 1990-an Pentagon mengabaikan ketentuan Kongres, memberikan pelatihan perang gerilya kota, pengamatan, keahlian penembak jitu (*sniper*), dan operasi psikologis melalui program pelatihan militer bersama (JCET) kepada pasukan khusus Indonesia. Program JCET memberikan pelatihan personil militer asing melalui anggaran *Special Operation Forces* (Unit Operasi Khusus) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dinyatakan bahwa tujuan program tersebut adalah untuk melatih *Special Operation Forces* Amerika Serikat, dengan personil militer asing sebagai penerima sekunder. Pentagon melatih personil militer Indonesia melalui JCET dari tahun 1992 sampai dengan 1997, sekalipun Kongres melarangnya. Selama periode tersebut militer Indonesia, termasuk Kopassus yang terkenal keburukannya itu, berpartisipasi dalam 36 pelatihan JCET. Di tahun 1998 Pentagon menghentikan bantuan JCET untuk Indonesia, akan tetapi di tahun 2005 bantuan tersebut dibuka kembali.

### 4.2.2 Embargo Militer Amerika Serikat

Selain penghentian dana bantuan dalam program pelatihan militer Indonesia oleh Amerika Serikat, kendala juga muncul saat militer Indonesia dikenai embargo oleh Amerika Serikat akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia di Timor Leste dan Papua. TNI tidak lagi memiliki kemudahan dalam membeli segala perlengkapan untuk Alutsistanya, bantuan dalam perlengkapan persenjataan yang bersifat mematikan tidak lagi didapatkan oleh TNI. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Setiap angkatan bersenjata menjadi lemah kemampuannya dikarenakan beberapa Alutsista yang dimiliki TNI tidak bisa beroperasi optimal karena embargo tersebut. Militer Indonesia hanya bisa merawat Alutsista yang ada dan hanya bisa mempergunakannya seadanya serta harus benar-benar dijaga kondisinya. Indonesia tidak bisa membeli amunisi dan *spare-part* Alutsista dari Amerika Serikat.

Kongres Amerika Serikat memutuskan untuk memberhentikan segala bentuk bantuan kemiliteran terhadap Indonesia sampai Indonesia bisa mengusut permasalahan HAM yang terjadi di negerinya. Dengan keputusan itu, militer Indonesia benar-benar mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan kemampuannya. Hal ini bertentangan dengan realisasi kerjasama untuk meningkatkan kapabilitas TNI, tetapi embargo telah dikenakan kepada militer Indonesia jauh sebelum IUSSD dilaksanakan, hal tersebut bisa dibilang kendala

yang ada sebelum Indonesia berusaha meningkatkan kapabilitas militernya melalui realisasi dari forum IUSSD.

Pada tahun 2005, setelah masa embargo berakhir pun, kekuatan pertahanan Indonesia masih berada dalam kondisi di bawah standar, bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Dari hal tersebut, embargo menjadi sebuah pukulan besar bagi militer Indonesia, karena tanpa adanya dukungan Alutsista yang baik, militer Indonesia tetap tidak dapat mengoptimalkan kemampuannya.

### 4.2.3 Minimnya Anggaran Pertahanan Indonesia

Kemampuan anggaran pertahanan saat ini masih berada di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) atau 3,32% terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika dibandingkan dengan negara tetangga, anggaran pertahanan Indonesia berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara yang pada umumnya memiliki anggaran pertahanan di atas 2% dari PDB. Kemampuan anggaran pertahanan tersebut baru dapat memenuhi 32,2% kebutuhan Dephan atau TNI.

Untuk mempertimbangkan keterbatasan kemampuan negara dalam menyediakan anggaran pertahanan dan keamanan pemerintah, serta dalam rangka mengurangi jumlah pinjaman luar negeri dalam pembangunan nasional, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan melalui pinjaman perbankan dalam negeri. Dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, langkah tersebut diupayakan melalui pengalihan sebagian pinjaman luar negeri

menjadi pinjaman dalam negeri terutama terhadap penyediaan Alutsista yang selama ini dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor. Namun, kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pinjaman dalam negeri sehingga penggunaan pinjaman luar negeri dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI belum dapat dielakkan.

Komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan produk industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI juga belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan nasional dalam memproduksi Alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer Indonesia, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping itu, untuk mencapai kemandirian industri dan teknologi militer bagi pertahanan negara dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

### 4.3 Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dengan kerjasama pertahanan dan keamanan yang dijalin dengan Amerika Serikat melalui dialog keamanan IUSSD, hubungan militer antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak awal diadakannya dialog keamanan, TNI sebagai pihak yang terlibat langsung dalam setiap program dari hasil dialog itu mendapatkan banyak hal baru yang dapat digunakan untuk terus mempertahankan keamanan negara.

Dan seperti tujuan dari reformasi TNI yang tanpa disadari diaplikasikan langsung melalui kerjasama IUSSD ini, dijalankan secara sungguh-sungguh sesuai dengan sistem yang berlaku pada negara demokratis melahirkan tentara profesional yang mempunyai tiga karakteristik: (1) Tidak berpolitik dan berniaga, (2) Mempunyai keahlian, kesatuan profesi, kompetensi teknis, serta mengetahui secara persis etika-etika militer, etika-etika perang, dan (3) Ketika tentara digelar untuk digunakan, berhasil memenangkan perang.

Dari setiap program yang diikuti oleh TNI, banyak pengetahuan dan kemampuan baru yang dihasilkan setiap angkatan. TNI dapat terus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia dan meningkatkan kemampuannya untuk mendukung pertahanan nasional negara RI. Amerika Serikat juga terus menaikkan anggaran bagi TNI dalam program IMET, FMF, dan FMS agar TNI dapat terus meningkatkan kapabilitasnya dan bisa meneruskan reformasi yang sedang dilaksanakan. Tetapi pengaruh yang didapatkan TNI dari realisasi IUSSD tidak terlalu signifikan karena selain pengaruh embargo militer, TNI juga tidak didukung dengan anggaran pertahanan yang memadai. TNI hanya mengalami peningkatan dari segi kemampuan teknis personil, untuk Alutsista TNI belum menunjukkan peningkatan yang baik, karena jumlahnya masih kurang dari batas minimum yang harus dimiliki untuk negara sebesar Indonesia.

Untuk mengukur kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia, dapat dinilai dari empat komponen utama.

1. Struktur pertahanan, jumlah personil, ukuran pasukan, dan komposisi unit yang terdiri dari beberapa divisi kekuatan pertahanan, seperti angkatan laut dan angkatan udara.
2. Modernisasi, kekuatan kecanggihan secara teknis, pasukan, sistem persenjataan, dan perlengkapan.
3. Kesiapan Pasukan, kesiapan untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan oleh komandan pasukan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini berdasarkan dari kemampuan setiap personil yang telah dirancang untuk hasil yang diinginkan.
4. Pengendalian, kemampuan untuk mengatur tingkatan yang diperlukan dan durasi aktifitas operasional untuk mencapai tujuan militer. Pengendalian adalah fungsi untuk menyediakan dan menjaga tingkat kesiapan pasukan, material, dan keperluan yang dipakai untuk mendukung kebutuhan militer

### 4.3.1 Struktur Pertahanan

Struktur pertahanan terdiri dari jumlah personil, ukuran pasukan, dan komposisi unit yang terdiri dari beberapa divisi seperti Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Ketiga angkatan ini memiliki batas ideal jumlah personil yang harus dipenuhi agar dapat menjaga integritas wilayah dengan optimal. Angkatan Laut sebagai unsur terpenting dalam menjaga wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan, harus terus meningkatkan kemampuan setiap personil dan Alutsistanya. Karena dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, terdapat kecenderungan adanya gangguan dari pihak luar.

Berdasarkan dari data yang dilampirkan dalam Tabel 3.1, Angkatan Laut Indonesia masih jauh dari harapan, kurang mendukungnya keadaan Alutsista menjadi faktor yang membuat Angkatan Laut kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 2005 pun, setelah IUSSD berjalan tiga kali, kondisi Angkatan Laut Indonesia belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Terlihat dari jumlah personil yang hanya terdiri dari 55.068 personil, padahal dengan keadaan Indonesia pada tahun 2005 tersebut, jumlah personil idealnya 130.068 personil, Jumlah personil Angkatan Udara pada tahun 2006 sebanyak 27.850 personil yang idealnya 58.150 personil, sama seperti Angkatan Laut, jumlah Angkatan Udara tidak memenuhi jumlah batas standar personil yang harus dimiliki. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya kinerja personil Angkatan Laut karena harus menutupi kekurangan personil tadi. Untuk jumlah personil Angkatan Darat Indonesia per-Oktober 2005 (setelah IUSSD berjalan tiga kali) berjumlah 276.052 prajurit, yang idealnya 763.200 prajurit, atau sama dengan satu orang prajurit per 365 orang warga Indonesia, sungguh jumlah yang sangat timpang dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005. Untuk lebih jelasnya, jumlah personil angkatan bersenjata tahun 2005 dan 2006 dilampirkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.6**
**Personil Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

| Angkatan Bersenjata | Jumlah Personil | Jumlah Ideal |
|---|---|---|
| Angkatan Laut (AL) (2005) | 55.068 | 130.068 |
| Angkatan Udara (AU) (2006) | 27.850 | 58.150 |
| Angkatan Darat (AD) (2005) | 276.052 | 763.200 |

sumber: Connie Rahakundini Bakrie dan Nur Iman Subono. *Pertahanan dan Postur Ideal TNI* diakses dari situs http://books.google.co.id, diakses 1 Juli 2009

Dapat dilihat bahwa jumlah personil dari tiap angkatan belum memenuhi jumlah ideal wilayah yang harus dijaga, hal itu dapat menimbulkan kecenderungan tidak mampunya TNI bertugas dengan optimal. Peningkatan kapabilitas yang diupayakan pun tidak terlihat signifikan karena ketimpangan antara jumlah personil, banyaknya penduduk dan wilayah yang harus dijaga.

Berdasarkan data tahun 2005, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai seperempat milyar jiwa, hanya memiliki jumlah personil AD sekitar 275.000 orang prajurit, jika dibandingkan dengan Singapura yang berpenduduk empat juta jiwa memiliki jumlah personil TNI AD sebanyak 50.000 orang prajurit (sekitar 20% dari jumlah personil TNI AD). Padahal jumlah penduduk Singapura hanya sebesar 1,89% dari Indonesia jika dihitung berdasarkan perbandingan jumlah populasi, personil AD Singapura lebih efektif daripada Indonesia, seorang prajurit AD Singapura mampu menjaga 89 orang penduduk, sedangkan seorang prajurit TNI AD hanya mampu menjaga sekitar 1.000 orang penduduk.

China dan India pun sama seperti Indonesia, seorang prajurit AD di China dan India rata-rata hanya mampu menjaga sekitar 1.000-an orang penduduk. Korea Utara yang berpenduduk 22 juta jiwa, seorang prajurit AD-nya mampu menjaga 23 penduduknya, hal ini lebih efektif dari kemampuan AD Singapura. Tetapi perbedaan ini tidak dapat dijadikan sebagai standar ukuran, karena Korea Utara lebih berorientasi pada pembangunan militer yang kuat dan modern, alasan ini diperkuat dengan melihat besarnya persentase PDB yang dialokasikan untuk anggaran pertahanan yang mencapai 20% dari total PDB sebesar US$ 422 (http://books.google.co.id/books?id=ipwN_Dg8tJUC&pg=PA161&lpg=PA161&d

q=jumlah+personil+TNI+2002&source=bl&ots=VReswqVnFq&sig=KNHcK9IWP0veM2ibZrDp4u3UTI&hl=id&ei=UoFKSru1EoTG6AP65MXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6, diakses 1 Juli 2009)

### 4.3.2 Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)

Untuk jenis dan jumlah Alutsista di udara, Angkatan Udara memiliki pesawat sebanyak 237 unit, pesawat tempur jenis *Fighter* 26 unit dan pesawat tempur tipe *FGA* sebanyak 18 unit. Sungguh jumlah yang sangat sedikit dibandingkan jumlah ideal yang harus dimiliki sebanyak 1890 unit, dan ditambah dengan tidak adanya pesawat jenis penghancur atau pembom, padahal untuk negara sebesar Indonesia kekuatan Angkatan Udara seperti itu sangat dibutuhkan, karena jika hanya mengandalkan jenis dan tipe pesawat tempur yang seadanya, Angkatan Udara tidak bisa menjaga wilayah udara Indonesia secara optimal.

Untuk jenis helikopter, Angkatan Udara memiliki helikopter *Assault* tipe *NAS-332L Super Puma* 5 unit, helikopter tipe *NAS-330 Puma* 11 unit, helikopter transport tipe *EC-120B Colibri* 12 unit, dan helikopter SAR tipe *S-58T* 10 unit, idealnya Angkatan Udara Indonesia memiliki 230 unit helikopter. Jumlah Alutsista Angkatan Udara Indonesia berada di bawah rata-rata negara Asia Tenggara, tetapi berada di atas rata-rata negara Asia Pasifik. Tapi tentu saja keadaan Alutsista yang demikian tetap menjadi faktor yang kurang mendukung dalam peningkatan kapabilitas TNI. Alutsista Angkatan Laut yang terdiri dari kapal selam kategori *tactical submarine* jenis *SSK* (*Patrol Submarine*) yang hanya berjumlah 2 unit (*Tjakra* tipe *209*), idealnya kapal selam ini berjumlah 10 unit

dengan tipe minimal SSN (*Attack Submarine Nuclear Powered*) dan 4 unit kategori *strategic* dilengkapi SLBM (*Submarine Launch Ballistic Missile*).

TNI AU pun hanya mempunyai kapal perang yang terdiri dari 13 unit kapal jenis *frigate* dan 16 unit jenis *Corvette*, serta kapal logistik dan pendukung yang berjumlah 15 unit, yang terdiri dari 6 unit kapal jenis *survey*, 2 unit kapal *tanker* yang mampu melakukan pengisian di laut, 2 unit kapal *tanker* biasa, 1 unit *repair ship*, 2 unit kapal penarik lintas laut, dan 1 unit kapal *support*. Ditambah kapal amphibi yang terdiri dari 26 unit tipe *Landing Ship Tank* (LST) dan 65 unit tipe *craft* (kapal *landing* ukuran sedang).

Kondisi Alutsista Angkatan Darat hampir sama seperti Angkatan Laut, jumlah Alutsista jauh dari standar yang harus dipenuhi untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2005. Jumlah tank yang dimiliki Angkatan Darat sebanyak 350 unit untuk jenis *Light Tank* (LT), idealnya tank ini berjumlah 5200 unit, dan tank jenis *Main Battle Tank* (MBT) sebanyak o (nol) unit, padahal tank jenis ini sangat penting dan jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia sebanyak 1200 unit. Selain itu Angkatan Darat juga memiliki tank tipe *AMX 13* sebanyak 275 unit, tipe PT 76 sebanyak 15 unit, dan tipe *Scorpion 90* buatan Inggris sebanyak 60 unit.

Dibandingkan dengan jumlah tank yang dimiliki negara-negara dikawasan Asia Pasifik, baik yang tergolong LT maupun MBT, Rusia menempati urutan pertama dengan jumlah tank sebanyak 22.950 unit, kemudian diikuti dengan China sebanyak 8.580 unit, Amerika Serikat sendiri berada di posisi ketiga dengan jumlah tank sebanyak 7.620 unit. Sedangkan Indonesia menempati urutan

ke-13 setelah Singapura. Di Asia Tenggara, jumlah tank TNI AD hanya berada di posisi keempat setelah Vietnam dengan 1.935 unit, Thailand dengan 848 unit dan Singapura. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah tank di Asia Pasifik yang mencatatkan nilai rata-rata sebesar 2.591 unit dan di Asia Tenggara dengan 419 unit, jumlah tank Indonesia masih berada dibawah rata-rata (Singapura 110 prajurit per-tank, Indonesia 665 prajurit per-tank) (http://books.google .co.id/books?id=ipwN_Dg8tJUC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=jumlah+personil +TNI+2002&source=bl&ots=VReswqVnFq&sig=KNHcK9IWP0veM2ibZrDp4u 3UTI&hl=id&ei=UoFKSru1EoTG6AP65MXDBQ&sa=X&oi=book_result&ct=re sult&resnum=6, diakses 1 Juli 2009).

Untuk jenis kendaraan tempur atau *Armoured Combat Vehicle* (ACV), terdiri dari tiga kategori, yaitu *Armoured Infantry Fighting Vehicle* (AIFV), *Armoured Personnel Cariier* (APC), dan *Recce* (*Recconnaissance*/kendaraan tempur intai). Untuk kategori AIFV Angkatan Darat hanya memiliki 11 unit tipe *BMP-2* yang idealnya sebanyak 6000 unit, untuk kategori APC Angkatan Darat hanya memiliki 356 unit yang terdiri dari berbagai macam tipe seperti 75 unit *AMX-VCI*, 40 unit *FV4333 stromer*, sekitar 80 unit *BTR-40*, 35 unit ACV tipe *BTR-50PK Commando Ranger*, 45 unit *FV603 Saracen*, sekitar 60 unit *LAV-150 Commando*. Jumlah totalnya 365 unit, padahal idealnya Angkatan Darat harus memiliki kendaraan tempur sebanyak 16.650 unit. Untuk kategori *Recce* Angkatan Darat memiliki 142 unit kendaraan, yang terdiri dari 55 unit tipe *Ferret*, 69 unit tipe *Saladin*, dan 18 unit *VBL*, padahal kebutuhan idealnya sebanyak 1200 unit.

Keseluruhan kendaraan tempur yang dimiliki Angkatan Darat yang berjumlah 509 unit, untuk bisa melindungi wilayah Indonesia, jumlah ideal kendaraan tempur yang harus dimiliki sebanyak 23.850 unit. Dilihat dari data dan kenyataan di lapangan, seorang prajurit Angkatan Darat per-kendaraan tempur adalah 1 prajurit per 458 kendaraan yang idealnya 1 prajurit per 32 kendaraan, merupakan jumlah yang sangat tidak seimbang dengan kemampuan rata-rata seorang prajurit. Untuk lebih jelasnya, keadaan Alutsista tiap angkatan juga dilampirkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**
**Keterangan Alat Utama sistem Senjata (Alutsista) TNI**

| | |
|---|---|
| Angkatan Laut (AL) | 1. Kapal Selam:<br>kategori *Tactical Submarine* jenis SSK (*Patrol Submarine*) 2 unit Tjakra tipe 209 (idealnya 10 unit kategori *tactical*, tipe minimal SSN atau *Attack Submarine Nuclear Powered* dan 4 unit kategori *strategic* dilengkapi SLBM atau *Submarine Launch Ballistic Missile*)<br>2. Kapal Perang:<br>1. Fregat 13 unit<br>2. Korvet 16 unit<br>3. Kapal Amphibi:<br>1. tipe *Landing Ship Tank* (LST) 26 unit<br>2. tipe *Craft* (Kapal *landing* ukuran sedang) 65 unit<br>4. Kapal logistik dan pendukung:<br>1. jenis kapal *Survey* 6 unit<br>2. kapal *Tanker* yg mampu melakukan pengisian di laut 2 unit<br>3. *Tanker* biasa 2 unit<br>4. *Repair Ship*1 unit<br>5. kapal penarik lintas laut 2 unit |

| | |
|---|---|
| | 6. kapal *support* 1 unit |
| Angkatan Udara (AU) | 1. Pesawat: 237 unit (idealnya 1890 unit)<br>2. Pesawat *Fighte*r: 26 unit<br>3. Pesawat tempur: 18 unit jenis *FGA*<br>4. Helikopter *Assault*: 5 unit tipe NAS-332L *Super Puma*<br>5. Helikopter: 11 unit tipe *NAS-330 Puma*<br>6. Helikopter *Transport*: 12 unit tipe EC-*120B Colibri*<br>7. Helikopter SAR: 10 unit tipe *S-58T*<br>(Idealnya 230 unit helikopter) |
| Angkatan Darat (AD) | *Tank*:<br>1. *Main Battle Tank* (MBT): nol unit (idealnya 1200 unit)<br>2. *Light Tank* (LT): 350 unit (idealnya 5200 unit)<br>3. *AMX 13*: 275 unit<br>4. *PT 76*: 15 unit<br>5. *Scorpion 90* (buatan inggris): 60 unit<br>*Armoured Combat Vehicle* (AVC):<br>1. *Armoured Infantry Fighting Vehicle* (AIFV): 11 unit tipe *BMP-2* (idealnya 6000 unit)<br>2. *Armoured Personnel Cariier* (APC): 356 unit (idealnya 16.650 unit)<br>1. *AMX-VCI*: 75 unit,<br>2. *FV4333 Stromer*: 40 unit,<br>3. *BTR-40*: sekitar 80 unit,<br>4. *ACV* tipe *BTR-50PK Commando Ranger*: 35 unit,<br>5. *FV603 Saracen*: 45 unit,<br>6. *LAV-150 Commando*: sekitar 60 unit<br>3. *Recce* (*Recconnaissance* atau Kendaraan Tempur Intai): 142 unit (idealnya 1200 unit)<br>1. *Ferret*: 55 unit<br>2. *Saladin*: 69 unit |

| | |
|---|---|
| | 3. *VBL* : 18 unit |

sumber: Connie Rahakundini Bakrie dan Nur Iman Subono. *Pertahanan dan Postur Ideal TNI* diakses dari situs http://books.google.co.id, diakses 1 Juli 2009

Dari keterangan keadaan Alutsista di atas, keadaan persenjataan Indonesia setelah beberapa kali dilaksanakan IUSSD belum juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadaan Alutsista, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam latihan bersama hanya dipakai saat latihan dan saat pelaksanaan pendidikan saja.

Belum ada bantuan pengadaan Alutsista yang benar-benar memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas TNI, sehingga personil tiap angkatan hanya bisa mencoba sistem persenjataan baru hanya dari latihan bersama. Keadaan Alutsista yang dimiliki hanya sekedar untuk berjaga-jaga saja karena kemampuan, kondisi, dan perlengkapannya yang kurang memadai.

### 4.3.3 Kesiapan dan Kemampuan Personil

Dalam setiap pelaksanaan latihan bersama, setiap personil dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dari pihak luar dengan cara-cara yang sesuai dengan teknik-teknik militer. Kecakapan dalam hal mengantisipasi atau menangani masalah bidang kemanusiaan dan bencana alam pun dilakukan bersama dengan militer Amerika Serikat. Setiap personil diberikan modal untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan oleh komandan pasukan untuk menjalankan tugas pokok mempertahankan integritas wilayah Indonesia.

Kesiapan personil yang diperlukan juga ditunjukkan dengan kemampuannya dalam merespon setiap kemungkinan yang akan terjadi di medan

pertempuran ataupun ketika dalam situasi yang belum diperhitungkan sama sekali, disini personil TNI harus mampu menyediakan segala sesuatu yang bisa digunakan dan dilakukan berdasarkan perintah komandan untuk menghadapi situasi tersebut. Setiap personil dari semua angkatan bersenjata terus meningkatkan kemampuannya dengan latihan bersama dan bantuan militer yang masih terus dilaksanakan.

Dari setiap latihan bersama maupun dialog antar angkatan bersenjata, seperti yang dilaksanakan TNI dan US PACOM, peningkatan kemampuan personil TNI terlihat baik, angkatan bersenjata Amerika Serikat memberikan pengetahuan dan cara-cara tentang menggunakan senjata serta mengajarkan taktik atau teknik yang dapat digunakan dalam menghadapi ataupun mengatasi segala bentuk ancaman keamanan dan perang. Hal tersebut berhasil meningkatkan tingkat kesiapan personil dalam melaksanakan perintah dari komandan pasukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Sebagai contoh lainnya, latihan bersama TNI dengan US PACOM dalam merealisasikan dialog tentang masalah terorisme, personil TNI dapat menguasai taktik, teknik, dan prosedur dalam mengambil keputusan yang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat mendesak dalam penanggulangan aksi teror. Dalam program kerjasama CARAT, keterampilan, profesionalisme, dan kesiapan personil berhasil ditingkatkan baik dari segi teknis dalam bentuk aktivitas operasi perang, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, personil TNI juga mendapatkan pendidikan melalui program IMET yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan latihan bagi personil

TNI yang kegiatannya dilaksanakan juga dengan negara lain, dengan ikut sertanya negara lain dalam program ini, setiap personil TNI mendapat kesempatan untuk memperlihatkan dan mengukur kemampuannya dengan angkatan bersenjata negara lain yang ikut serta dalam program IMET. Kerjasama antar angkatan bersenjata kedua negara juga berhasil meningkatkan kemampuan individual personil TNI, hal itu dapat dilihat dari keinginan Amerika Serikat untuk terus menjalin kerjasama dengan Indonesia.

Dari realisasi IUSSD, kesiapan personil dari setiap angkatan bersenjata yang didapat dari dialog, latihan bersama, dan bantuan militer berbeda-beda. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, karena hal itu, tingkat kesiapan personil yang paling terlihat peningkatannya ada pada Angkatan Laut, realisasi dari dialog lebih banyak terdapat pada latihan bersama bidang maritim yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh TNI AL dan Marinir Amerika Serikat. Personil kekuatan laut mendapatkan banyak pengetahuan dan teknik-teknik dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di wilayah laut seperti bencana alam, gangguan pihak asing, dan masalah perbatasan. Kapabilitas personil Angkatan Laut harus mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran.

Kesiapan setiap personil dari semua angkatan menjadi andalan utama karena keterbatasan Alutsista yang dimiliki Indonesia. Setiap personil TNI harus benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan dalam latihan bersama agar kemampuan menyediakan kapabilitas sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan komandan pasukan untuk menjalankan tugas yang diberikan dapat terpenuhi.

Untuk saat ini, kesiapan kemampuan personil militer Indonesia menunjukkan hasil yang baik, dengan adanya latihan bersama, kemampuan setiap personil TNI dirancang untuk hasil yang diinginkan, tetapi Indonesia belum mampu menggunakan Alutsistanya untuk benar-benar optimal dalam mengatasi ancaman dari luar, sehingga kesiapan pasukan dalam melaksanakan perintah komandan harus selalu ditingkatkan agar bisa menutupi kekurangan faktor Alutsista tadi.

### 4.3.4 Pengendalian Kemampuan Angkatan Bersenjata

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan integritas wilayah Indonesia, pengendalian dalam menggunakan tingkatan dan durasi aktifitas operasional untuk mencapai tujuan militer sangat diperlukan. Dalam latihan militer dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat, TNI mendapatkan pendidikan untuk merencanakan setiap kebutuhan untuk tujuan militer secara efektif dan efisien.

Pengendalian kesiapan pasukan, material, dan keperluan yang dipakai untuk mendukung kebutuhan militer menjadi salah satu faktor penting tercapainya suatu tujuan militer. Faktor kesiapan dan pengendalian selalu ditingkatkan dalam setiap latihan bersama, seperti dalam dialog antara US PACOM dan TNI yang kemudian direalisasikan dalam bentuk latihan bersama untuk penanggulangan bencana alam, hal ini untuk mendayagunakan potensi angkatan bersenjata dalam mengendalikan setiap kebutuhan agar sesuai dengan kapasitas bentuk penanggulangan bencana alam tersebut, jika potensi yang digunakan dalam penanggulangan bencana alam tersebut tidak disesuaikan dengan tingkatan yang

diperlukan, maka kemampuan yang dimiliki angkatan tersebut bisa tidak akan efektif atau tidak efisien.

Setiap pengendalian yang ditujukan bagi pasukan, material dan keperluan angkatan bersenjata untuk melaksanakan tujuan militernya harus diatur sedemikian rupa, tetapi hal tersebut harus didukung juga dengan kondisi Alutsista yang ada, tanpa hal tersebut tingkat kesiapan pasukan dalam merespon segala bentuk ancaman militer tidak bisa dilakukan secara optimal. Alutsista merupakan salah satu hal penting yang digunakan dalam aktifitas operasional TNI untuk mencapai tujuan militernya, tingkat kesiapan pasukan tidak akan mencapai titik ideal apabila faktor material dan keperluan Alutsista yang dipakai tidak cukup terpenuhi jumlah dan kondisi standarnya.

Dari setiap latihan bersama dan bantuan militer, TNI mengalami peningkatan dalam beberapa faktor seperti kesiapan pasukan dan durasi operasional, tetapi tidak dalam material dan keperluan yang dipakai dalam mendukung kebutuhan militer. Sebagai contoh, jumlah kapal laut yang dimiliki Indonesia pada tahun 2007 tidak mencapai titik ideal, dengan luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, TNI Angkatan Laut membutuhkan 376 kapal untuk mengamankan NKRI. Tahun 2007 tercatat jumlah kapal TNI Angkatan laut dengan berbagai ukuran hanya sebanyak 120 buah, dari jumlah tersebut hanya tiga diantaranya berukuran besar. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengendalian kemampuan angkatan bersenjata, karena jika material atau keperluan dalam mendukung kebutuhan militer tidak dalam kondisi yang mencapai standar, maka akan muncul masalah-

masalah yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan tidak optimalnya fungsi dari pengendalian kemampuan angkatan bersenjata.

Begitu juga dengan anggaran pertahanan yang belum mencukupi untuk melaksanakan fungsi menyediakan dan menjaga tingkat kesiapan pasukan, material, dan keperluan yang dipakai untuk mendukung kebutuhan militer, berperan penting bagi bentuk pertahanan dan untuk meningkatkan peran aktif setiap angkatan bersenjata Indonesia. Anggaran pertahanan yang dimiliki Indonesia memang mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi jumlahnya belum memenuhi kebutuhan standar berdasarkan jumlah personil angkatan bersenjata, dan jumlah serta kondisi Alutsista yang dimiliki dengan keadaan luas wilayah Indonesia yang begitu besar, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa anggaran pertahanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan TNI.

Pengendalian kemampuan angkatan bersenjata juga ditentukan dengan adanya kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain yang direalisasikan dalam latihan bersama ataupun bantuan dana bagi TNI dalam kerangka IUSSD, sampai saat ini, latihan militer dan bantuan dana yang diberikan negara lain belum ada yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengendalian kemampuan angkatan bersenjata Indonesia, hal tersebut menyebabkan kemampuan dan tujuan setiap angkatan bersenjata Indonesia belum tercapai secara optimal.